

**POLITIK RUANG: PEREBUTAN RUANG DI KAWASAN**

**WISATA PANTAI PURUS PADANG**

**SKRIPSI**

*“Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas”*

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIJAL ULHAQ**

**2010832043**



**Pembimbing:**

**Dr. Tengku Rika Valentina, MA**

**Mhd Fajri, S.IP., MA**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

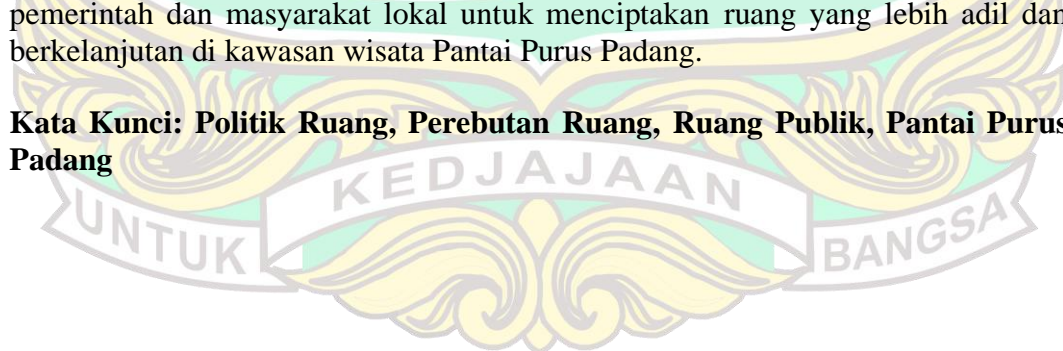
**PADANG**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena perebutan ruang yang terjadi di kawasan wisata Pantai Purus Padang. Perebutan ini muncul akibat berbagai pihak yang berupaya memanfaatkan ruang publik pantai sesuai kepentingan masing-masing. Pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan penertiban dan penataan untuk menjadikan kawasan ini sebagai ruang wisata yang tertib dan teratur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030. Namun, penataan ini menimbulkan resistensi dari berbagai entitas seperti PKL dan oknum lain yang merasa bahwa kebijakan tersebut mengabaikan kepentingan ekonomi mereka. Dalam penelitian ini pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perebutan ruang yang berlangsung di kawasan wisata Pantai Purus Padang. Penelitian ini menggunakan teori produksi ruang Henry Lefebvre (1991) yang membagi konsep ini menjadi tiga kategori utama yaitu praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasional. Teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik pemilihan informan. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan praktik spasial di kawasan wisata Pantai Purus Padang terlihat dari aktivitas masyarakat lokal, seperti pedagang kaki lima (PKL) dan nelayan yang memanfaatkan ruang untuk kehidupan ekonomi, representasi ruang terlihat dari regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan wisata Pantai Purus, sedangkan ruang representasi menunjukkan bagaimana masyarakat lokal, PKL, pemerintah dan pengunjung memberikan makna berbeda terhadap ruang Pantai Purus Padang. Pemaknaan yang berbeda menjadikan ruang publik di kawasan wisata Pantai Purus Padang menjadi arena konflik dan kontestasi antara aktor-aktor atau entitas yang berupaya mendominasi ruang demi kepentingan ekonomi atau sosial. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada para pedagang dan pemerintah, tetapi juga mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan akomodatif yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat lokal untuk menciptakan ruang yang lebih adil dan berkelanjutan di kawasan wisata Pantai Purus Padang.

**Kata Kunci: Politik Ruang, Perebutan Ruang, Ruang Publik, Pantai Purus Padang**



## ABSTRACT

*This research is motivated by the phenomenon of space competition occurring in the tourist area of Pantai Purus Padang. This competition arises from various parties attempting to exploit the public beach space according to their own interests. The Padang City Government issued a regulation and arrangement policy to make this area a neat and orderly tourist space in accordance with the Padang City Regional Spatial Plan (RTRW) for the years 2010-2030. However, this arrangement has caused resistance from various entities such as street vendors and other individuals who feel that the policy neglects their economic interests. In this research, the research question is how the struggle for space is occurring in the tourist area of Pantai Purus Padang. This study uses Henry Lefebvre's (1991) theory of space production, which divides this concept into three main categories: spatial practice, representation of space, and representational space. This theory is used as a reference in the research. This research uses a qualitative approach with a case study method and employs purposive sampling as the technique for selecting informants. The researcher used interviews and documentation as data collection techniques. The research results show that spatial practices in the Pantai Purus Padang tourist area are evident from the activities of the local community, such as street vendors (PKL) and fishermen who utilize the space for economic life. The representation of space is seen in the regulations and government policies in developing Pantai Purus tourism, while the representational space shows how the local community, PKL, government, and visitors give different meanings to the Pantai Purus Padang space. Different interpretations make the public space in the Pantai Purus Padang tourist area an arena of conflict and contestation between actors or entities striving to dominate the space for economic or social interests. These conflicts not only affect traders and the government but also impact the comfort of tourists. This study suggests the need for a more collaborative accommodative approach between the government and the local community to create a fairer and more sustainable space in the Pantai Purus Padang tourist area.*

**Keywords:** *Spatial Politics, Struggle for Space, Public Space, Purus Padang Beach*